Februari, 2026, Volume 8 Nomor 1
E-ISSN 2656-1026

KAJIAN SOSIAL PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY PALANGKA RAYA

Arief Rahman Hakim[1], Sriyana[2], Asro' Laelani Indrayanti[1], Silvia Arianti[3], Wiwik Suprapti[2], Elyta Vivi Yanti[3], Rakha Satya Idsan[4], Nicko Haryadi[1]
[1]Pertanian, Universitas PGRI Palangka Raya
[2]Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya
[3]Pendidikan, Universitas PGRI Palangka Raya
[4]Teknologi Industri Pertanian, Universitas Palangka Raya
(email: vivielyta@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan Flamboyan Bawah, Palangka Raya, dengan menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Data dikumpulkan dari 207 responden yang terdiri dari warga Flamboyan Bawah, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut dalam bentuk prosentase (%) yang dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sosial, masyarakat Flamboyan Bawah memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, namun masih terdapat permasalahan dalam perumahan dan status tempat tinggal. Dari aspek ekonomi, mayoritas warga bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang bervariasi, sehingga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam aspek budaya, masyarakat masih mempertahankan tradisi lokal, meskipun terpengaruh oleh modernisasi. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, serta dampak negatif dari pembangunan yang dapat merusak lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika masyarakat Flamboyan Bawah serta kontribusinya terhadap pembangunan Water Front City di Palangka Raya.

Keyword : **Pembangunan, Water Front City, Masyarakat, Sosial, Ekonomi Budaya**

Pendahuluan

Water Front City merupakan konsep pengembangan wilayah yang memanfaatkan potensi sumber daya air sebagai daya tarik utama. Konsep ini mengedepankan integrasi antara lingkungan alam dan pembangunan infrastruktur, dengan tujuan menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik bagi masyarakat. Di Palangka Raya, pengembangan Water Front City diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melestarikan lingkungan. Dengan letak geografis yang strategis di tepi sungai, Palangka Raya memiliki potensi besar untuk mengembangkan kawasan ini sebagai destinasi wisata dan pusat kegiatan sosial-ekonomi.

Water Front City (WFC) merupakan konsep penataan dan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang publik terpadu yang mengintegrasikan fungsi rekreasi, budaya, ekonomi, dan konservasi lingkungan. Konsep ini dirancang untuk menjadikan garis tepi sungai sebagai wajah tata kota yang ramah publik sekaligus memiliki nilai estetika dan identitas lokal. Di Palangka Raya, gagasan WFC diarahkan pada penataan kawasan di sekitar Jembatan Kahayan, Tugu Soekarno, serta sepanjang bantaran Sungai Kahayan agar menjadi area publik yang fungsional dan atraktif bagi warga dan wisatawan. (Syamsuri dkk, 2019)

Secara perencanaan kota, WFC memiliki beberapa fungsi penting: (1) memperkuat fungsi ruang publik kota dan mengembalikan akses masyarakat terhadap sungai; (2) meningkatkan potensi pariwisata dan kegiatan ekonomi berbasis lokasi sungai; (3) mendukung konservasi lingkungan bantaran sungai melalui penataan ruang yang terkontrol; dan (4) mempertegas identitas kota lewat desain lanskap yang memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal. Implikasinya, WFC diharapkan menjadi katalisator pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif ketika dirancang dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. (Syamsuri dkk, 2019)

Water Front City memiliki arti penting yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Menurut Purnamasari dan Supriyanto (2020), pengembangan kawasan ini dapat meningkatkan interaksi sosial antarwarga, menciptakan ruang publik yang inklusif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kawasan ini juga berpotensi menjadi pusat pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Beberapa kajian dan tinjauan ilmiah yang menelaah konsep WFC dan penataan bantaran di Palangka Raya menunjukkan temuan-temuan penting. Studi SWOT tentang pengembangan Waterfront City di Palangka Raya memaparkan kekuatan (misal. potensi lokasi bantaran Sungai Kahayan), kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diatasi dalam implementasi konsep tersebut; penulis menekankan pentingnya perencanaan terpadu yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. (Syamsuri dkk, 2019)

Beberapa ahli telah mengemukakan pentingnya pengembangan Water Front City. Menurut Widyastuti (2019), konsep ini dapat

memberikan solusi terhadap masalah urbanisasi yang sering dihadapi oleh kota-kota besar, termasuk Palangka Raya. Penelitian sebelumnya oleh Rahman dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tepi air dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum yang memadai.

Meskipun pengembangan Water Front City menawarkan berbagai keuntungan, terdapat pula permasalahan sosial yang perlu diperhatikan. Menurut Sari (2021), salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya konflik sosial akibat pergeseran penggunaan lahan. Pengembangan infrastruktur yang cepat dapat mengakibatkan penggusuran masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, serta meningkatkan ketimpangan sosial. Selain itu, masalah pencemaran lingkungan dan pengelolaan sumber daya air juga menjadi isu yang perlu diatasi agar pengembangan kawasan ini berkelanjutan.

Berdasarkan literatur dan pengalaman proyek serupa, pembangunan WFC berpotensi menimbulkan beberapa masalah sosial apabila perencanaan dan pelaksanaan tidak dikelola inklusif, antara lain:

1. Perubahan Mata Pencaharian. Revitalisasi bantaran dapat menggantikan atau mengubah aktivitas ekonomi lokal (nelayan, pedagang bantaran), sehingga memerlukan program mitigasi dan pelatihan alternatif.
2. Relokasi dan Kerentanan Sosial. Penataan ruang kadang menuntut pembongkaran permukiman informal; tanpa kebijakan relokasi yang adil, hal ini dapat meningkatkan kerentanan sosial.
3. Akses Publik yang Terganggu. Komersialisasi kawasan dapat mengurangi akses publik bagi kelompok berpendapatan rendah kecuali ada jaminan ruang publik yang terjangkau.
4. Ketegangan Antara Pelestarian dan Modernisasi. Upaya "mendandani" kawasan bersejarah dapat menimbulkan konflik nilai antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian identitas lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dari pengembangan Water Front City di Palangka Raya. Dengan memahami permasalahan yang ada, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan kawasan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskursus akademik mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan kota-kota yang berbasis pada potensi sumber daya alam.

Kajian sosial terhadap pembangunan Water Front City Palangka Raya penting karena beberapa alasan: (1) memberikan pemahaman empiris mengenai dampak sosial dari intervensi ruang publik bantaran sungai; (2) menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memastikan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan; (3) mengidentifikasi strategi mitigasi terhadap risiko sosial seperti relokasi, kehilangan mata pencaharian, atau eksklusi ruang publik; dan (4) menyumbang pada literatur lokal mengisi kekosongan bukti empiris mengenai bagaimana masyarakat Palangka Raya bereaksi dan beradaptasi terhadap proyek-proyek penataan sungai. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan

perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekologis daerah.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada kurangnya integrasi data sosial budaya dalam perencanaan tata ruang termasuk perencaaan pembangunan Water Front City di Flamboyan Bawah. Padahal, data ini krusial untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan sosial.

Namun demikian, di balik persoalan tata ruang dan lingkungan, kawasan bantaran Sungai Kahayan juga merupakan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya tertentu. Aktivitas ekonomi tradisional seperti mencari ikan, mencuci, hingga praktik-praktik budaya Dayak yang masih bertahan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga di bantaran sungai. Sayangnya, pendekatan penataan kawasan selama ini masih dominan bersifat teknokratis dan fisikalistik, tanpa memperhatikan dimensi sosial budaya masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial budaya, diharapkan pembangunan Water Front City di Flamboyan Bawah dapat dilakukan dengan cara yang lebih harmonis, humanis dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan Flamboyan Bawah. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan di kawasan Flamboyan Bawah. Mixed method digunakan untuk mengidentifikasi keadaan sosial, ekonomi, serta budaya di kawasan Flamboyan Bawah dengan besaran prosentase (%) yang kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Responden penelitian ini sebanyak 207 orang terdiri dari berbagai pihak, diantaranya: warga Flamboyan Bawah, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi partisipatif, wawancara secara mendalam, studi dokumentasi serta Focus Group Discussion (FGD). Adapun analisis data menggunakan metode analisis tematik, melalui beberapa tahapan berikut: reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi terkait aspek-aspek sosial dalam pembangunan *Water Front City* Palangka Raya maka dapat diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Budaya

A. Karakteristik Sosial

Pembangunan waterfront city tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memiliki karakteristik sosial yang penting, mencakup pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Aspek-aspek ini berperan dalam menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial waterfront city. Menurut penelitian oleh Sari (2021), akses terhadap pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks waterfront city, pembangunan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan pusat pelatihan, dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

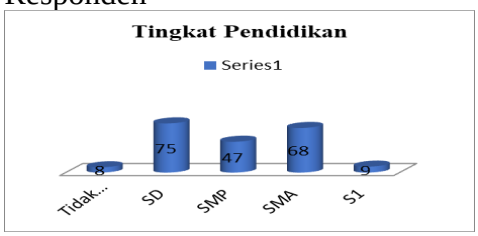
Tingkatan pendidikan dari 207 responden yang di dapat untuk pendidikan ini dari lulusan SD, SMP, SMA, Sarjana ada juga yang tidak bersekolah. Tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
Tidak Bersekolah	8	3.86
SD	75	36.23
SMP	47	22.71
SMA	68	32.85
S1	9	4.35
Jumlah	207	100.00

Sumber: Data yang diolah, 2025

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden



Sumber: Data yang dioleh, 2025

Tingkat pendidikan merujuk pada pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden. Secara umum dilihat dari tingkat pendidikan untuk tidak bersekolah ini berjumlah 8 orang atau 3,86%, yang lulus SD 75 orang atau 38,23%, SMP 47 orang atau 22,71%, SMA berjumlah 68 orang atau 32,85% dan S1 bejumlah 9 orang atau 4.35%

Selanjutnya, kesehatan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam pembangunan waterfront city. Rizki (2022) mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas dan rumah sakit, sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pembangunan waterfront city yang baik harus memperhatikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

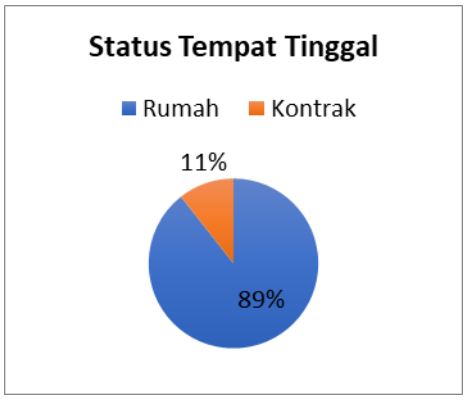
Status tempat tinggal yang mereka tempati ada yang rumah pribadi da nada yang kontrak. Data dari 207 responden dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 2. Status Tempat Tinggal Responden

Status Tempat Tinggal	Presentase	Jumlah Responden
Rumah	89.37	185
Kontrak	10.63	22
Jumlah	100.00	207

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Grafik 2. Status Tempat Tinggal



Sumber: Data yang diolah, 2025

Status tempat tinggal dari data yang dikumpulkan itu terbanyak ada rumah pribadi dengan persentase 89% atau 185 orang sedangkan untuk yang kontrak berjumlah 11%. tempat tinggal yang layak merupakan aspek krusial dalam pembangunan sosial waterfront city. Pramudito (2020) menekankan pentingnya perencanaan hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas publik. Pembangunan perumahan yang beragam, mulai dari rumah sederhana hingga hunian yang lebih mewah, dapat memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perumahan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mendukung interaksi sosial antarwarga.

Aspek sosial menunjukkan dua arah yang saling terkait: di satu sisi, masyarakat melihat adanya peningkatan interaksi sosial dengan warga luar kawasan (74,40 % setuju); di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap perubahan budaya, norma, dan nilai. Sebanyak 48,79 % responden setuju bahwa pembangunan *Water Front City* berpotensi menyebabkan pergeseran budaya, dan 47,83 % menilai norma-norma sosial dapat berubah.

Meski demikian, terdapat kesadaran tinggi pada aspek pengelolaan lingkungan. Pernyataan mengenai kesadaran warga dalam pengelolaan sampah, air limbah, dan septic tank memperoleh skor 76,33 % (setuju) dan 21,26 % (sangat setuju). Artinya, pembangunan *Water Front City* justru dapat mendorong transformasi positif dalam pola hidup masyarakat menuju kesadaran lingkungan yang lebih baik.

Selain itu, dari hasil penelitian ini juga mendapatkan gambaran tentang kerawanan sosial di kawasan Flamboyan Bawah yaitu sebagai berikut:

a. Dari kerawanan sosial yang sering terjadi tindakan kriminal/pelanggaran hukum dilingkungan ini dari 207 responden ini antara lain: ini ada 129 orang menjawab tidak pernah dengan tidak tidak terjadi dalam satu tahun terakhir 71 orang menjawab jarangterjadi satu kali dalam satu tahun terakhir, dan 7 orang menjawab sering terjadi satu kali dalam tiga bulan sekali
b. Dari responden 207 orang yang menjawab untuk pencurian itu ada 64 orang menjawab jarang terjadi satu kali dalam satu tahun terakhir, menjawab sering terjadi dalam satu kali dalam 3 bulan sekali sebanyak 8 orang dan 135 orang menjawab tidak pernah terjadi dalam satu tahun terakhir.
c. Perjudian ini dari 207 responden di dapatkan bahwa 159 orang menjawab tidak pernah terjadi perjudian dalam satu tahun terakhir, 37 orang menjawab

jarang terjadi dalam satu kali dalam satu tahun terakhir, 8 orang menjawab sering terjadi perjudian dalam satu kali dalam tiga bulan dan yang menjawab sering sekali terjadi lebih dari satu kali dalam 3 bulan terakhir bejumlah 3 orang.

d. Tindakan dalam penyalagunaan obat-obatan dari 207 responden yang menjawab tidak pernah terjadi dalam satu tahun terakhir berjumlah 146 orang responden, 45 orang menjawab jarang terjadi satu kali dalam satu tahun terakhir, 13 orang menjawab sering tejadi satu kali dalam tiga bulan dan 3 orang menjawab sering kali terjadi penyalahgunaan obat-obatan dan terjadi lebih dari satu kali dalam tiga bulan terakhir.
e. Kerawanan sosial dalam perdagangan narkoba ini dilihat dari 207 responden ini yang menjawab tidak pernah terjadi dalam satu tahun terakhir ini ada 152 orang, 42 orang menjawab jarang terjadi satu kali dala satu tahun terakhir, 11 orang menjawab sering terjadi satu kali dalam tiga bulan sekali dan 3 orang menjawab sering kali terjadi lebih dari satu kali dalam tiga bulan terakhir dalam perdagangan narkoba.
f. Dalam penyalahgunaan minuman beralkohol ini dari hasil wawancara dengan 207 responden yang menjawab tidak pernah terjadi dalam satu tahun terakhir penyalahgunaan minuman beralkohol ini ada 141 responden, 52 orang menjawab jarang terjadi satu kali dalam satu tahun terakhir, 11 orang menjawab sering terjadi satu kali dalam tiga bulan sekali dan 3 orang menjawab sering kali terjadi lebih dari satu kali dalam tiga bulan terakhir.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan waterfront city adalah potensi terjadinya segregasi sosial. Suhendra (2023) mencatat bahwa jika perencanaan tidak dilakukan secara inklusif, dapat muncul kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan yang baik dengan mereka yang tidak. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga semua suara dapat didengar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Secara keseluruhan, karakteristik sosial dalam pembangunan waterfront city mencakup pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pembangunan waterfront city dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

B. Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi dari proyek ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan regional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik investasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomi dalam pembangunan waterfront city harus dikelola dengan baik untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbasis pada model pengembangan kawasan water front city Flamboyan Bawah Kota Palangka Raya, maka dapat di identifikasi berbagai peluang usaha yang berkaitan dengan destinasi wisata berbasis air dan sungai. Berbagai peluang tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: usaha penginapan skala kecil, usaha persewaan perahu wisata dan wahana air lainnya, usaha kuliner dan sovenir, usaha penyewaan tempat parkir, kolam pemancingan, serta wahana edukasi lingkungan.

Pengembangan Homestay dan Akomodasi Lokal seperti pemerintah perlu menyusun standarisasi homestay (sanitasi, keamanan, fasilitas air bersih, dan penanganan darurat). Dukungan berupa pelatihan hospitality (keramahtamahan, manajemen homestay, pemasaran digital). Penyediaan platform promosi resmi agar wisatawan domestik maupun mancanegara mudah menemukan homestay unik milik masyarakat.

Pengelolaan Wisata Air dan Wahana Sungai seperti memberikan akses pembiayaan mikro (kredit lunak/hibah) untuk usaha penyewaan perahu, kano, banana boat, dan wahana lainnya.Pemerintah daerah perlu membuat regulasi keamanan wisata air (standar perahu, penyelamatan, penggunaan pelampung). Pelatihan bagi pengelola mengenai keselamatan dan pelayanan wisata air. salah satu karakteristik ekonomi utama dari waterfront city adalah potensi pengembangan sektor pariwisata. Menurut penelitian oleh Sari (2021), waterfront city sering kali dirancang untuk menarik wisatawan dengan menawarkan berbagai fasilitas rekreasi, hiburan, dan budaya. Pengembangan tempat-tempat wisata seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan area hiburan di tepi laut dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan waterfront.

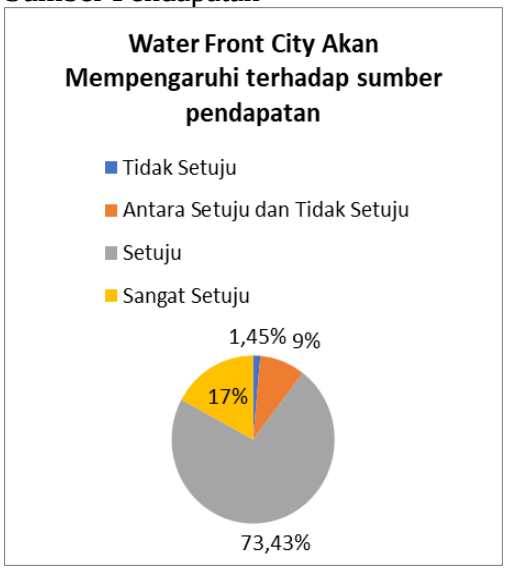
Pengembangan Usaha Kuliner dan Souvenir seperti pemerintah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang keamanan pangan, inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran digital. Mendorong UMKM lokal untuk menghasilkan produk khas daerah (kuliner berbasis pangan lokal, kerajinan rotan, olahan sungai). Fasilitasi branding dan promosi agar produk kuliner dan souvenir memiliki daya saing.

Wahana Edukasi dan Wisata Budaya seperti menyediakan mentor/pendamping profesional untuk paket wisata budaya, workshop, dan konservasi sungai. Mengintegrasikan wisata edukasi dengan kurikulum sekolah (field trip, ekowisata pelajar). Mengembangkan event budaya tahunan di kawasan sungai untuk menarik wisatawan. Rizki (2022) mengungkapkan bahwa pembangunan waterfront city juga dapat mendorong investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Infrastruktur yang baik, seperti transportasi, sanitasi, dan utilitas, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ketika infrastruktur ditingkatkan, hal ini tidak hanya menarik investor tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur menjadi salah satu

kunci keberhasilan pembangunan waterfront city.

Pada aspek ekonomi, hasil penelitian memperlihatkan respon positif. Pernyataan "perlu peningkatan keterampilan" memperoleh skor tertinggi, yaitu 81,16 % (setuju) dan 18,84 % (sangat setuju). Begitu pula dengan pernyataan mengenai peningkatan lapangan kerja (78,74 % setuju, 18,36 % sangat setuju). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada pembangunan *Water Front City* sebagai sarana membuka peluang ekonomi baru, baik melalui sektor pariwisata, perdagangan, maupun jasa.

Grafik 3. Pengaruh WFC Terhadap Sumber Pendapatan

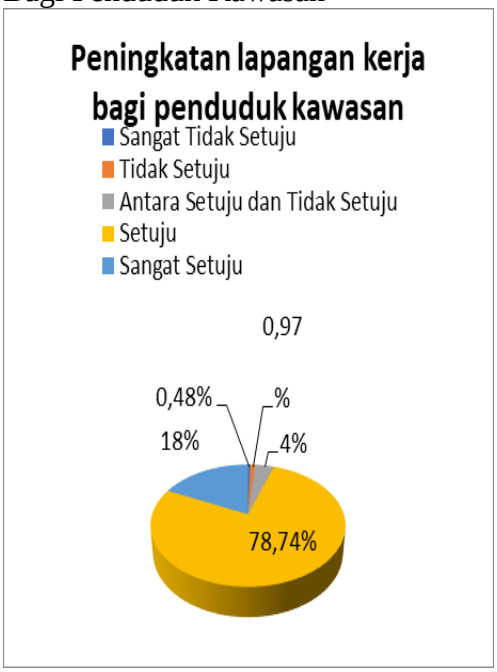


Sumber: Data yang diolah, 2025

Pramudito (2020) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Keterlibatan ini juga dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek.

Adanya Water Front City akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi penduduk kawasan Flamboyan Bawah, hal ini terlihat dalam grafik 4 berikut ini.

Grafik 4. Peningkatan Lapangan Kerja Bagi Penduduk Kawasan

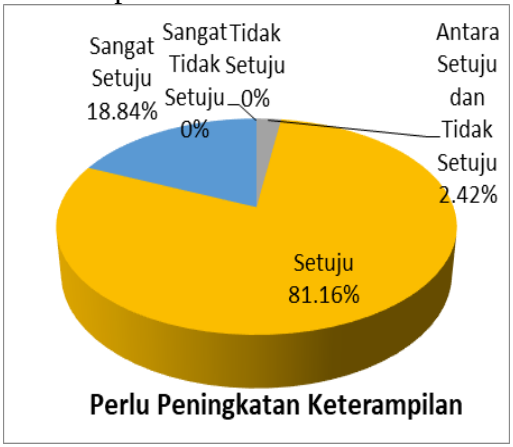


Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan grafik 4. Terlihat bahwa sebanyak 78,74 responden menyatakan bahwa keberadaan WFC akan berdampak secara ekonomi dengan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat kawasan Flamboyan Bawah. Sedangkan 0,48% menyatkan tidak setuju adanya dampak pada peningkatan lapangan kerja.

Guna menghadapi tantangan ke depan bagi peningkatan lapangan kerja masyarakat kawasan Flamboyan Bawah perlu diberikan pelatihan keterampilan sebagaimana hasil penelitian berikut ini.

Grafik 5. Perlu Peningkatan Keterampilan



Sumber: Data yang diolah, 2025

Dari grafik 5 terlihat bahwa 81,16% menyatakan setuju bila masyarakat kawasan Flamboyan Bawah perlu diberikan pelatihan keterampilan. Hal ini sebagai upaya menyiapkan masyarakat kawasan Flamboyan Bawah memiliki keterampilan yang memadai seperti keterampilan memasak, membuat anyaman, pernik-pernik, kuliner dan cindramata khas Kalimantan Tengah sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat kawasan Flamboyan Bawah pada khususnya.

Secara keseluruhan, karakteristik ekonomi dalam pembangunan waterfront city mencakup potensi pengembangan pariwisata, investasi infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengelola aspek-aspek ini secara efektif, waterfront city dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

C. Karakteristik Budaya

Pembangunan waterfront city menjadi salah satu tren dalam perencanaan kota modern, terutama di kawasan pesisir. Karakteristik budaya memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas lokal dan nilai-nilai masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam pembangunan waterfront city dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menarik minat wisatawan.

Karakteristik budaya lokal harus diakomodasi dalam desain dan fungsi ruang publik. Menurut penelitian oleh Pramudito (2020), elemen-elemen budaya lokal, seperti seni, arsitektur, dan tradisi, dapat diintegrasikan ke dalam desain waterfront city. Misalnya, penggunaan motif dan bahan bangunan yang mencerminkan budaya setempat dapat menciptakan ruang yang tidak hanya estetis tetapi juga memiliki makna bagi masyarakat. Hal ini dapat memperkuat rasa memiliki dan keterikatan masyarakat terhadap lingkungan mereka.

Aspek wisata menjadi salah satu yang paling dominan dalam penelitian ini. Hampir semua item memperoleh skor tinggi, menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap pengembangan kawasan *Water Front City* sebagai destinasi wisata. Penyediaan pusat kuliner lokal memperoleh skor tertinggi (80,68 % setuju, dan 17,39 % sangat setuju), diikuti oleh penyediaan fasilitas swafoto (80,19 % setuju) dan pusat oleh-oleh (78,26 % setuju, dan 18,84% sangat setuju).

Selain itu, kegiatan budaya dan seni juga harus menjadi bagian

integral dari pengembangan waterfront city. Sari (2021) menekankan bahwa penyelenggaraan festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan lokal di ruang publik waterfront dapat meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat komunitas. Kegiatan ini tidak hanya menarik pengunjung tetapi juga memberikan platform bagi seniman lokal untuk mengekspresikan kreativitas mereka, sehingga memperkaya kehidupan budaya di kawasan tersebut.

Semua responden baik responden internal maupun responden eksternal berpendapat bahwa pembangunan *water front city* di Flamboyan Bawah. Harus memiliki ciri sebagai destinasi wisata yang mengambarkan kearifan dan budaya dayak. Serta terintegrasi dengan kawasan-kawasan lain disekitarnya. Menurut Noorhamidah dkk (2022) pembangunan *Water Front City* mempunyai potensi untuk mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata baru kota Palangka Raya. Berupa wisata kuliner, pemancingan, susur sungai, ruang terbuka publik dan wisata budaya. Namun harus disadari bahwa pembangunan *Water Front City* sebagai satu destinasi wisata baru disamping memberikan manfaat Positif juga menimbulkan dampak negatif.

"Gagasan untuk membangun rumah betang dengan berbagai pernik etnik suku dayak yang dilengkapi dengan sovenir yang identik, serta pengembangan kuliner lokal (ikan betok) juga disarankan para responden eksternal yang lain". Seperti kata Fledericl dari ini Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalteng, Kata Joko dari Satpol PP Kota Palangka Raya, dan kata Rosaria Siagian dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Gerakan Sadar Wisata adalah sebuah program atau upaya yang digagas pemerintah (khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) bersama masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung terciptanya iklim pariwisata yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Masyarakat di RT 01 dan RT 02 RW XXII Kelurahan Pahandut masih memiliki tradisi yang dipertahakan sampai saat ini yaitu upacara *memapas lewu*. Upacara Memapas Lewu adalah salah satu tradisi adat masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Kata *memapas lewu* berasal dari bahasa Dayak Ngaju, di mana *memapas* berarti membersihkan atau menyucikan, dan *lewu* berarti kampung/desa. Jadi, upacara ini memiliki makna penyucian kampung atau desa dari segala hal buruk yang bisa mendatangkan gangguan, musibah, atau marabahaya. Disamping upacara memapas lewu juga masih ada acara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia seperti acara tujuh bulanan, acara pemberian nama anak, dan rangkayan acara pernikahan.

Pembangunan waterfront city juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan yang berkaitan dengan budaya lokal. Rizki (2022) menyatakan bahwa praktik-praktik budaya yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan sumber daya

alam secara bijak, dapat diintegrasikan dalam pengembangan waterfront. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik dapat mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang menghargai alam. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Budaya Dan Lingkungan Di Kawasan Flamboyan Bawah

Masyarakat menyadari bahwa pembangunan *Water Front City* berpotensi memicu konflik, terutama dalam pengelolaan fasilitas dan ruang publik. hal ini terlihat dari banyaknya responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa setelah *water front city* dibuka akan terjadi konflik dalam pengelolaan wahana, pengelolaan tempat wisata kuliner, tempat swaf foto dan penjualan souvenir. Oleh karena itu, pengorganisasian pedagang memperoleh skor tertinggi (74,40 % setuju, dan 24,15 % sangat setuju). Oleh karena itu perlu dilakukan pengorganisasian pedagang sebelum dan selama operasional *water front city*, masyarakat pun menyadari bahwa pengorganisasian pedagang ini sangat penting (jumlah yang menyatakan sangat setuju dan setuju sebanyak 98,55%. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang tradisional perlu dikelola secara terstruktur agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun kesemrawutan kawasan.

Konflik sosial di dalam masyarakat sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut penelitian oleh Sari (2022), di beberapa desa, ketegangan antara kelompok masyarakat yang mendukung penggunaan lahan untuk pertanian dan kelompok yang lebih memilih pengembangan pariwisata sering kali menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak hanya mengganggu keharmonisan sosial, tetapi juga berdampak negatif pada pelestarian budaya lokal yang terkait dengan praktik pertanian tradisional.

Selain itu, pengorganisasian fasilitas parkir, wahana air, serta fasilitas pendukung lain juga mendapat skor tinggi. Artinya, pembangunan Water front city harus disertai dengan manajemen konflik yang sistematis untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan keberlanjutan kawasan. Untuk itu perlu adanya upaya sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Pedagang Tradisional seperti membentuk asosiasi/koperasi pedagang sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Menata zona usaha berdasarkan jenis kegiatan (kuliner, souvenir, wahana hiburan) agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun kesemrawutan kawasan.
b. Manajemen Konflik yang Sistematis seperti membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah, pengelola *Water Front City*, pedagang, dan masyarakat lokal. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, dan adil melalui tim mediasi.
c. Pengaturan Fasilitas Pendukung seperti mengelola fasilitas parkir dengan sistem terintegrasi untuk mencegah kemacetan dan pungutan liar. Menetapkan standar operasional wahana air terkait keamanan, kapasitas, dan jadwal. Menyusun tata tertib pemanfaatan ruang publik (spot swafoto, jalur pedestrian, ruang hijau).
d. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat seperti melibatkan

masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan. Menyelenggarakan program pelatihan (manajemen usaha kecil, pelayanan pariwisata, kebersihan, keamanan) bagi pedagang dan pelaku usaha.

e. Kebijakan dan Regulasi Jangka Panjang seperti menyusun peraturan daerah atau aturan khusus pengelolaan *Water Front City*. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, limbah, dan kualitas air.Mendorong inovasi digital (aplikasi reservasi, e-ticketing, promosi kuliner) untuk meningkatkan keteraturan dan mengurangi potensi gesekan.

Suhendra (2023) mengungkapkan bahwa proyek-proyek pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan lingkungan yang telah ada. Masyarakat merasa terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik yang lebih besar. Konflik juga dapat muncul akibat perbedaan pandangan mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Pramudito (2024) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek sering kali bertentangan dengan kelompok yang berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Ketegangan ini dapat menghambat upaya kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan, yang seharusnya menjadi tujuan bersama.

Lebih jauh lagi, Rizki (2025) menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam mengatasi konflik. Dalam tradisi masyarakat nelayan di Cirebon, misalnya, praktik-praktik budaya yang telah berlangsung lama berfungsi sebagai mekanisme untuk meredakan ketegangan. Namun, dengan adanya tekanan dari modernisasi dan eksploitasi sumber daya, nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan, yang pada gilirannya dapat memperburuk konflik. Terakhir, Mardiana (2023) menekankan bahwa pendidikan dapat berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pendidikan dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan dialog yang konstruktif antara berbagai pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kajian sosial pembangunan water front city Palangka Raya maka dapat disimpulkan bahwa dari karakteristik sosial menunjukkan bahwa kawasan Flamboyan Bawah memiliki interaksi sosial yang sangat intens, adanya kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, meskipun juga masih ditemukan kerawanan sosial. Dari karakteristik ekonomi, bahwa sebagian masyarakat kawasan Flamboyan Bawah bekerja disektor informal, pembangunan WFC akan berdampak pada peningkatan pendapatan, namun juga perlu adanya pelatihan keterampilan. Sedangkan dari karakteristik budaya, bahwa adanya destinasi wisata yang dibalut dengan kegiatan dan festival budaya yang mengembangkan dan melestarikan budaya khususnya budaya suku Dayak. Adapun tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya adalah masih adanya konflik dalam pengelolaan fasilitas publik dan adanya gangguan keamanan.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian maka dapat direkomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kesiapan masyarakat lokal dalam menerima program *water front city* di kawasan Flamboyan Bawah perlu adanya: sosialisasi secara terus menerus, membangun kesepakatan bersama masyarakat, dan membentuk kelompok kerja persiapan pembangunan WFC.
2. Berkaitan dengan peluang ekonomi bagi masyarakat perlu adanya: pengembangan homestay dan akomodasi lokal, pengelolaan wisata air dan wahana sungai, pengembangan usaha kuliner dan souvenir, penyediaan dan pengelolaan parkir wisata, **pengembangan wisata pemancingan dan camping tepi sungai, serta** wahana edukasi dan wisata budaya.
3. Berkaitan dengan pengembangan ciri khas destinasi wisata perlu: membangun destinasi wisata berbasis air dan sungai dengan tetap menunjukan identitas budaya Dayak, membangun keterkaitan antara destinasi wisata di kawasan Flamboyant dengan Kawasan-kawasan lain di sekitarnya dengan prinsip komplementer, serta Perlu dilakukan pembenahan baik pembenahan fisik kawasan maupun pembenahan budaya masyarakatnya.
4. Berkaitan dengan potensi konflik dalam pembangunan *water front city* perlu untuk: pengorganisasian pedagang tradisional, manajemen konflik yang sistematis, pengaturan fasilitas pendukung, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta kebijakan dan regulasi jangka panjang seperti menyusun peraturan daerah.

References

Mardiana. (2023). Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan di Sekolah Berbudaya Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Lingkungan, 12*(1), 45-60. https://doi.org/10.1234/jpl.2023.001

Noorhamidah, T., Wijaya Garib, T., & Santoso, M. (2017). Analisa penataan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. *Jurnal Perspektif Arsitektur, 12*(2), 211–221. Universitas Palangka Raya.

Pramudito, A. (2020). Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dalam Waterfront City. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15*(1), 45-60. https://doi.org/10.1234/jep.2020.001

Pramudito, A. (2024). Pendekatan Lanskap Budaya Berkelanjutan di Desa Tapak Lestari. *Jurnal Perencanaan Wilayah, 15*(2), 78-89. https://doi.org/10.1234/jpw. 2024.002

Purnamasari, D., & Supriyanto, A. (2020). Pengembangan Water Front City dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 6(2), 123-135. https://doi.org/10.1234/jpwk.v6i2.123

Rahman, F., & Lestari, N. (2021). Dampak Pengembangan Kawasan Tepi Air Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 4(3), 78-89. https://doi.org/10.9101/jse.v4i3.78

Rizki, S. (2022). Dampak Pembangunan Waterfront City terhadap Ekonomi Lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah, 10*(2), 112-130. https://doi.org/10.1234/jpw.2022.002

Rizki, S. (2025). Tradisi Nadran dan

Pelestarian Lingkungan di Cirebon. *Jurnal Kearifan Lokal, 8*(3), 123-135. https://doi.org/10.1234/jkl.2025.003

Sari, D. (2021). Pariwisata dan Ekonomi dalam Pembangunan Waterfront City. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 8*(3), 78-89. https://doi.org/10.1234/jpek.2021.003

Sari, D. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Budaya Pampang. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 10*(1), 34-50. https://doi.org/10.1234/jpkp.2022.004

Sari, R. (2021). Permasalahan Sosial dalam Pengembangan Water Front City. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 99-110. https://doi.org/10.1111/jis.v3i2.99

Suhendra, R. (2023). Tantangan Pariwisata Massal di Desa Wisata Cireundeu. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan, 9*(2), 112-125. https://doi.org/10.1234/jpb.2023.005

Syamsuri, S., Asmawati, Y., & Ikat, S. A. (2019). *SWOT Analysis Of Waterfront City: The Development Concept in Palangka Raya*. *Journal of Urban Development Studies*, 12(2), 145–156. https://doi.org/10.1234/juds.v12i2.5678

Widyastuti, A. (2019). Konsep Water Front City sebagai Solusi Urbanisasi. *Jurnal Perencanaan Kota*, 5(1), 45-57. https://doi.org/10.5678/jpk.v5i1.45